

ABSTRAK

Nilai-nilai demokrasi masyarakat diwujudkan dalam sebuah pemilihan langsung yang adil untuk menentukan masa depan berbangsa dan bernegara terutama di daerah. Pemilihan kepala daerah juga sebagai bentuk pelaksanaan otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kepala daerah mempunyai tanggungjawab besar mensejahterakan dan mengatur masyarakat yang memilihnya menjadi lebih baik. Namun, praktiknya, ada beberapa kepala daerah yang gagal melaksanakan hak dan kewajibannya sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berdampak terhadap pemberhentian atau *impeachment*. Mekanisme pemberhentian kepala daerah secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Pada masa pandemi Covid-19, Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Instruksi Menteri Nomor 6 Tahun 2020 yang pada pokoknya menjelaskan pemberhentian kepala daerah apabila tidak mematuhi atau melanggar protokol kesehatan. Melihat kenyataan ini, tentu saja Instruksi Menteri sebagai *beleid regels* atau peraturan kebijakan bukan termasuk peraturan perundang-undangan yang berkekuatan hukum mengikat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Oleh karena itu, menyoal kedudukan Instruksi Menteri sebagai legitimasi pemberhentian kepala daerah menjadi begitu ideal dan konseptual dalam hubungannya dengan Undang-Undang Pemerintahan Daerah serta konsekuensinya pada pemberhentian kepala daerah sesuai mekanisme yang telah ditentukan.

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yang diharapkan mampu memberikan sumbangsih solusi dalam mengkaji bahan hukum yang berhubungan dengan Pemberhentian kepala daerah khususnya yang diatur dalam sebuah peraturan kebijakan.

Dengan demikian, tidak terjadi kekaburan hukum yang berhubungan dengan penerapan peraturan kebijakan berupa Instruksi yang dikeluarkan oleh kementerian dalam negeri pada masa Pandemi Covid-19 mengenai pemberhentian kepala daerah yang tidak mematuhi atau melanggar protokol kesehatan.

Kata kunci : Pemberhentian Kepala Daerah. Instruksi Menteri. Pemerintahan Daerah

ABSTRACT

The democratic values of society are manifested in a fair direct election to determine the future of the nation and state, especially in the regions. Election of regional heads is also a form of regional autonomy in implementing regional governance. The regional head has a big responsibility to improve the welfare and control of the people who choose him. However, in practice, there are several regional heads who fail to carry out their rights and obligations as mandated by statutory provisions which have an impact on dismissal or impeachment. The mechanism for dismissing regional heads is expressly regulated in Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government. During the Covid-19 pandemic, the Ministry of Home Affairs issued Ministerial Instruction Number 6 of 2020 which basically explains the dismissal of regional heads if they do not comply with or violate health protocols. Seeing this fact, of course, the Ministerial Instruction as regulation or policy regulation does not include statutory regulations that have a binding legal force as regulated in Law Number 12 of 2011 as amended by Law Number 15 of 2019. Therefore, questioning The position of the Minister's Instruction as the legitimacy of the dismissal of regional heads is ideal and conceptual in relation to the Regional Government Law and consequently the dismissal of regional heads according to a predetermined mechanism.

This research uses normative legal research, statutory approaches and conceptual approaches which are expected to be able to contribute solutions in examining legal materials related to the dismissal of regional heads, especially those regulated in a policy regulation.

Thus, there is no legal confusion related to the implementation of policy regulations in the form of instructions issued by the ministry of interior during the Covid-19 pandemic regarding the dismissal of regional heads who do not comply with or violate health protocols.

Keywords: *Dismissal of Regional Heads. Ministerial Instructions. Local government*